

Angket Jangan Cuma untuk Pilpres, Kecurangan Luar Biasa Justru di Pileg

JAKARTA (IM) - Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menyoti wacana sejumlah pihak yang ingin mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Ali, hak angket DPT jangan Cuma untuk Pilpres 2024 saja. Hak angket juga harus menyoar Pileg.

"Kalau yang diwacanakan adalah kecurangan Pemilu, maka tentu harus menyoar semuanya, baik pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga Pilpres, gitu ya, tentu ini juga harus diwacanakan," kata Ali Armunanto, saat dihubungi, Senin (26/2).

Menurutnya, isu kecurangan justru banyak diduga dilakukan oleh sejumlah partai politik. Justru jika hak angket hanya menyoar Pilpres, maka menurutnya akan menimbulkan pertanyaan.

"Tentu kalau dilakukan secara parsial hanya Pilpres, tentu ini kan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Kenapa Pilegnya juga tidak ditanyakan? Toh kecurangan-kecurangan Pemilu yang luar biasa justru terjadi di Pileg," kata Ali.

Ia mencontohkan misalnya kecurangan pada Pileg adalah politik uang

pada pemilihan legislatif di tingkat DPRD provinsi maupun kota. Justru, menurutnya jika DPR hanya mempersoalkan hasil Pemilu Presiden saja akan terkesan politis.

"Misalnya money politik itu yang terjadi secara vulgar itu di Pileg, terutama di DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Tentu ini juga harus diusut juga gitu, jangan hanya Pilpres saja. Karena kalau hanya Pilpres kesan politisnya, atau kesan Pilpres ini dijadikan komoditas politis terlalu kelihatan gitu kesannya," katanya.

Ali mencurigai isu hak angket DPR ini rentan dijadikan alat untuk tawar menawar kekuasaan. Sebab menurutnya ada sejumlah parpol yang diduga terkait dengan isu kecurangan Pemilu.

Oleh karenanya, ia mendorong, agar adil, maka harus diusut hak angket untuk Pilpres dan Pileg.

"Jadi mestinya kalau mau dilakukan ya harus adil, tapi memang ya saya mencurigai ini hanya sebagai strategi untuk dijadikan sebagai alat tawar dalam bargaining politik pasca Pemilu," katanya. ● **han**

Dugaan Ada Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga akibat rasuah pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI, menimbulkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik menjerat pelaku dengan pasal kerugian keuangan negara.

"(Kerugian) miliaran rupiah," kata Ali saat dihubungi, Senin (26/2).

KPK sejak tahu lalu memang tengah menyelidiki dugaan korupsi di lingkup lembaga legislatif. Pada 31 Mei 2023, KPK memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar sebagai terperiksa untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Usai jalani pemeriksaan, Indra enggan menanggapi wartawan. Ia bahkan berlari-lari kecil

menghindari para wartawan yang akan mencernanya sejumlah pertanyaan.

Setelah hampir setahun, penyidik, Jaksa, pejabat struktural, dan pimpinan KPK, akhirnya bersepakat meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

"Itu sudah sepekat dalam gelar perkara naik ke proses penyidikan," kata Ali dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/2) lalu.

Sebagai informasi, ketika KPK telah memutuskan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan, pasti telah ditetapkan pihak yang menjadi tersangka. Meski demikian, Ali enggan mengungkap siapa tersangka dalam dugaan korupsi ini. ● **mei**

KPK Sita Rumah Mewah hingga 14 Ruko Milik Andhi Pramono di Batam

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah mewah hingga 14 ruko milik mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono, di kawasan Kepulauan Riau.

Andhi dan keluarganya memang berdomisili dan pernah bertugas di Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau.

"(Aset-Aset yang disita) Diduga milik tersangka Andhi Pramono yang berlokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Senin (26/2).

Sejumlah aset yang disita itu antara lain, satu bidang tanah dan bangunan dengan luas 840 meter persegi yang terletak di Komplek Grand Summit at Southlinks, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Kemudian, satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya di perumahan Center View Blok A Nomor 32 Kota Batam, satu bidang tanah seluas 1.674 meter persegi di Kelurahan

Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Lalu, 14 ruko di Tanjung Pinang juga disita penyidik. Ali menyebut, dalam proses upaya paksa penyitaan tersebut penyidik melibatkan Kepala satuan Tugas (Kasatgas) Pengelola Barang Bukti KPK Ahmad Budi Ariyanto.

"Dalam rangka untuk menjaga dan perawatan aset sitaan serta kelancaran koordinasi dengan pihak terkait lainnya," tutur Ali.

Aset-aset Andhi Pramono itu bakal dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan sebagai barang-barang hasil korupsi dan bentuk tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Sehingga dapat dirampas dalam rangka asset recovery," kata Ali.

Dalam perkara ini, Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 58,9 miliar terkait pengurusan kepabeanan ekspor dan impor.

Uang itu diduga diterima ketika ia menjadi pegawai Bea dan Cukai. ● **mei**

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG UJI MATERIIL PERPPU CIPTA KERJA

Ketua MK Suhartoyo (tengah) menyaksikan ahli presiden mengucap sumpah saat memimpin sidang uji materiil penetapan Perppu Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/2). Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan pemohon sejumlah organisasi buruh itu beragendakan mendengarkan keterangan ahli presiden.

KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Menag: Untuk Memberikan Kemudahan

Selama ini KUA hanya berfungsi tempat pencatatan pernikahan umat Islam. Seandainya pencatatan nikah agama lain dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

JAKARTA (IM) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pencatatan dan tempat pernikahan semua agama di Indonesia adalah untuk memberikan kemudahan.

Sebab selama ini, KUA hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan pernikahan umat Islam. Sedangkan pencatatan nikah agama lain dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

"Selama ini kan saudara-saudara kita non-islam mencatatkan pernikahannya di

catatan sipil. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masak enggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?" kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Rencana menjadikan KUA untuk tempat pencatatan pernikahan untuk semua agama masih terus dibicarakan antara Direktur Jenderal Bina Masyarakat (Dirjen Bimas) di Kemenag. Belum lama ini, para Dirjen sudah bertemu untuk membahas kemungkinan tersebut. Begitu

pula untuk membicarakan mekanisme, regulasi, maupun penyesuaian yang diperlukan.

"Kita lagi bicarakan ini. Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up," ucap Yaqut.

Yaqut mengukuhkan kementerian siap jika merevisi Undang-Undang (UU) untuk mengakomodir usulan tersebut. Intinya, pembahasan ini akan melibatkan semua pihak terkait (*stakeholder*).

"Saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan untuk semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama, mau merevisi undang-undang atau apa pun, saya kira orang akan memberikan dukungan," jelas Yaqut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Is-

lam) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, KUA sebagai pusat layanan lintas keagamaan akan diluncurkan pada 2024.

"Tahun ini pula segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama," ujar Kamaruddin.

Pihaknya akan menyulap

KUA selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan Direktorat Bimas Islam menjadi tempat layanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Meskipun hanya terbentuk di 5.917 kecamatan, tetapi melayani masyarakat yang tersebar di 7.277 kecamatan," paparnya. ● **han**

FOTO: ANT



AKSI FORUM MASYARAKAT MAHASISWA TIMUR DI KANTOR ICW

Massa Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI membakar ban dan membawa poster saat aksi unjuk rasa di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Senin (26/2/2024). Dalam aksi tersebut mereka menegaskan bahwa bukan kelompok preman serta menyikapi rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur.

Kubu Prabowo Mulai Dekati Parpol Pengusung Ganjar dan Anies

JAKARTA (IM) - Kubu Calon presiden (*capres*) dan calon wakil (*cawapres*) nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mulai melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik (*parpol*) pengusung (*capres*) dan *cawapres* nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, serta *capres-cawapres* nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Parpol-parpol tersebut diajak bergabung dalam pemerintahan mendatang. Cuman, komunikasi yang dijalin masih pada layer kedua, sehingga belum menyentuh level ketua umum.

"Tapi itu masih sebatas obrolan warung kopi. Biasanya obrolan seperti ini menjadi bahan yang memuluskan kalau para ketum nanti memang memutuskan untuk bergabung bersama-sama," ujar Anggata Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Dradjad Wibowo, kepada wartawan, Senin (26/2).

Menurut Dradjad, pendekatan dilakukan untuk merealisasikan janji Prabowo yang selalu disampaikan dalam kampanye maupun debat *capres*, yaitu bakal menjadi presiden untuk semua masyarakat Indonesia.

"Beliau juga mengatakan kalau beliau yang diberi mandat dari pesaingnya siapa saja yang terbaik kalau mau berkontribusi beliau akan sangat *welcome*. Itu un-

tuk membuktikan apa yang beliau sampaikan. Karena memang beliau serius dengan apa yang beliau sampaikan," kata Dradjad.

Dradjad mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan pihaknya masih tahap awal, dan belum mengerucut pada keputusan yang serius. Sebab, saat ini berbagai elite *parpol* masih memikirkan perolehan suaranya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Tapi ya sekarang fokusnya masih legislatif, jadi nanti setelah legislatif saya rasa para ketum *parpol* itu akan masing-masing rapat internal baru akan memutuskan ke mana begitu," katanya.

Seperti diketahui, pasangan Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024 didukung oleh tiga *parpol*, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedangkan, pasangan Ganjar dan Mahfud, didukung dua *parpol* yang ada di parlemen, yaitu PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini masih belum mengumumkan hasil penghitungan suara sah Pileg dan Pilpres 2024. Prosesnya penghitungan masih berjalan. ● **mei**



FOTO: ANT

SIDANG LANJUTAN KASUS KORUPSI PENGADAAN GAS ALAM CAIR
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan berjalan usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/2). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa.